DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

POKOK-POKOK PERUBAHAN DAN KESIAPAN PENYALURAN TAHAP I DANA DESA TAHUN 2018 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.50/ PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
2. Peraturan Menteri Keuangan No.226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor 1/MK.7/2018 Tanggal 8 Januari 2018;
4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua PER-4/PB/2017 tentang Juknis Penyaluran DAK F dan DD pada DJPb;
5. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran No.S-412/PB.2/2018 Hal Pemenuhan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap I TA.2018;
6. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran No.S-481/PB.2/2018 Hal DIPA Petikan dan Langkah-langkah Persiapan Penyaluran DD Tahap I TA 2018;
7. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran No.S-482,521, dan 591/PB.2/2018 hal Penyampaian Rekapitulasi Penerimaan Peraturan Daerah APBD TA 2018.

KEPULAUAN RIAU

1 PMK 226/2017

Perubahan Rincian Dana Desa Per Kabupaten

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Kab. Bintan	36	616,345	22,188,420	-	8,715,494	30,903,914
Kab. Karimun	42	616,345	25,886,490	-	9,558,037	35,444,527
Kab. Natuna	70	616,345	43,144,150	-	11,370,644	54,514,794
Kab. Lingga	75	616,345	46,225,875	157,549*)	10,630,121	57,013,545
Kab. Kepulauan Anambas	52	616,345	32,049,940	-	11,437,628	43,487,568
Total Provinsi Kepulauan Riau	275	3,081,725	169,494,875	157,549*)	51,711,924	**) 221,364,348

*) Dalam PMK 226/PMK.07/2017:
Terdapat perubahan Alokasi Afirmasi untuk Kab.Lingga yang semula dalam Perpres 107/2017 tentang Rincian APBN 2018 sebesar Rp294.142.000,- menjadi Rp157.549.000,-

**) Alokasi DD Kepri sebesar 0,37% dari alokasi DD Nasional sebesar Rp60 Triliun

2 Tahapan Penyaluran Dana Desa berubah, semula 2 tahap menjadi 3 tahap

Tahap I 20%
- Paling cepat disalurkan bulan Januari
- Paling lambat minggu ketiga bulan Juni

Tahap II 40%
- Paling cepat disalurkan bulan Maret
- Paling lambat minggu keempat bulan Juni

Tahap III 40%
- Paling cepat bulan Juli

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Perda APBD TA berjalan
2. Peraturan Kepala Daerah ttg Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Dana Desa per Desa

1. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyaluran DD TA sebelumnya
2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD TA sebelumnya

1. Laporan penyaluran DD Tahap I ke RKD **paling kurang 75%**;
2. Laporan realisasi penyerapan DD Tahap I rata-rata paling kurang 75%; dan rata-rata capaian output paling kurang 50%

PMK 225/2017 & PER-1/PB/2018

3

PERUBAHAN PENYALURAN DANA DESA

DALAM RANGKA PELAKSANAAN SKEMA PADAT KARYA TUNAI

Penyesuaian Kebijakan Penyaluran Dana Desa paling cepat bulan Januari dengan PMK No. 225/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

NO	SEMULA	MENJADI
1	**Penyaluran dari RKUN ke RKUD** 1.Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat Juli, dengan persyaratan: a. Perda APBD (rekapitulasi Penerimaan Perda APBD); b. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan c. Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya 2.Tahap II sebesar 40%, paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan: 1) Laporan penyaluran DD Tahap I ke RKD paling kurang 90%; 2) Laporan realisasi penyerapan DD Tahap I rata-rata paling kurang 75%; dan rata-rata capaian output paling kurang 50%	**Peyaluran dari RKUN ke RKUD** **1.Tahap I sebesar 20%** paling cepat **Januari** dan paling lambat **minggu ketiga Juni**, dengan persyaratan: a. Perda APBD (rekapitulasi Penerimaan Perda APBD); dan b. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa. **2.Tahap II sebesar 40%** paling cepat **Maret** dan paling lambat **minggu keempat Juni**, dengan persyaratan: Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya **3. Tahap III sebesar 40%,** paling cepat bulan **Juli** dengan persyaratan: a. Laporan penyaluran DD Tahap I ke RKD **paling kurang 75%**; b. Laporan realisasi penyerapan DD Tahap I rata-rata paling kurang 75%; dan rata-rata capaian output paling kurang 50%
2	**Penyaluran dari RKUD ke RKD** 1. Tahap I disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan: a. Perdes APB Desa; dan b. Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya. 2. Tahap II: disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan: a. Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan rata-rata paling kurang 75%; dan b. capaian output rata-rata paling kurang 50%	**Peyaluran dari RKUD ke RKD** **1. tahap I** disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan **Perdes APB Desa;** **2. tahap II** disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan **Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya**. 3. Tahap III disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan: a. Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan rata-rata paling kurang 75%; dan b. capaian output rata-rata paling kurang 50%
3	**Belum ada informasi mengenai :** •jumlah tenaga kerja yang digunakan, •durasi pekerjaan dan •besaran upah. dalam laporan pelaksanaan Dana Desa	**Menambahkah :** •jumlah tenaga kerja yang digunakan, •durasi pekerjaan dan •besaran upah dalam laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan

Tahapan/langkah KPPN selaku KPA Penyaluran DD

1. Kepala KPPN (KPA Penyalur) menetapkan Surat Keputusan dalam hal terdapat perubahan pejabat PPK,PPSPM,operator penyalur dan pelaporan keuangan.
2. Mengunduh DIPA Petikan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 (No DIPA-999.05-0/2018 TKDD Satker KPPN Pengelola Penyaluran DAK F dan DD TA 2018) (pdf dan ADK aplikasi RKAKL DIPA Online).
3. Mengunggah ADK DIPA ke SAKTI.
4. Menetapkan SKPRDD TA 2018 dari OM SPAN.
5. Koordinasi dan komunikasi dengan Pemda untuk menyampaikan Perda APBD ke DJPK dan **mengupload** softcopy Peraturan Bupati/Walikota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa ke Aplikasi OMSPAN
6. memastikan bahwa Perda APBD Pemda yang disampaikan oleh Koordinator KPA Penyaluran / Dir PA **sudah diterima dan mengecek dalam OM SPAN.**
7. PPK verifikasi dokumen persyaratan → SPP ; PPSPM → SPM
8. Uraian SPP/SPM = " Penyaluran Tahap I Dana Desa untuk Kabupaten……TA 2018"

Perkembangan Kesiapan Penyaluran Tahap I (20%) Dana Desa 2018 Lingkup Provinsi Kepulauan Riau sd 22 Januari 2018

KPPN TANJUNGPINANG

No.	Kab/Kota	Pagu DIPA	Perda APBD	Surat Pemberitahuan Koordinator KPA (Dit.PA)	Nomor/Tanggal Perda dan Tgl.Penyampaian	Perkada Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD per Desa	Nomor dan Tgl.Perkada	Pagu Tahap I (20%)	Keterangan
1	3201 - KAB. BINTAN	30,903,914,000	BELUM ADA			BELUM ADA		6,180,782,800	BELUM LAYAK SALUR
2	3203 - KAB. NATUNA	54,514,794,000	ADA	S-482/PB.2/2018 tanggal 15 Januari 2018	No.15 Tahun 2017 disampaikan Tgl.27 Des 2017	ADA		10,902,958,800	LAYAK SALUR
3	3204 - KAB. LINGGA	57,013,545,000	ADA	S-521/PB.2/2018 tanggal 16 Januari 2018	No.12 Tahun 2017 disampaikan Tgl.11 Jan 2018	BELUM ADA		11,402,709,000	BELUM LAYAK SALUR
4	3205 - KAB. ANAMBAS	43,487,568,000	ADA	S-591/PB.2/2018 tanggal 17 Januari 2018	No.8 Tahun 2017 disampaikan Tgl.9 Jan 2018	BELUM ADA		8,697,513,600	BELUM LAYAK SALUR

KPPN BATAM

No.	Kab/Kota	Pagu DIPA	Perda APBD	Surat Pemberitahuan Koordinator KPA (Dit.PA)	Nomor/Tanggal Perda dan Tgl.Penyampaian	Perkada Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD per Desa	Nomor dan Tgl.Perkada	Pagu Tahap I (20%)	Keterangan
1	3202 - KAB. KARIMUN	35,444,527,000	BELUM ADA			BELUM ADA		7,088,905,400	BELUM LAYAK SALUR

TERIMA KASIH